

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAHAN KOTA PADANG DAN KOTA PARIAMAN TAHUN
2013-2017**

*COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BETWEEN
GOVERNMENT PADANG CITY AND PARIAMAN CITY 2013-2017*

Sintya Khairany; Jhon Rinaldo; Citra Liza

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara pemerintah Kota Padang dan Kota Pariaman dengan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang dan Kota Pariaman pada tahun anggaran 2013-2017 dengan menggunakan beberapa rasio. Data yang diperoleh berupa data sekunder yang berasal dari BPKA Kota Padang dan BPKAD Kota Pariaman. Data ini dianalisis dengan menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan, antara lain rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Kota Pariaman lebih efektif dalam menghasilkan PAD dari yang dianggarkan dari pada Kota Padang, akan tetapi Kota Padang lebih efisien dalam membelanjakan pendapatan ketimbang Kota Pariaman, Selanjutnya peranan pemerintah pusat masih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah baik Kota Padang maupun Kota Pariaman, meskipun Kota Padang lebih mandiri ketimbang Kota Pariaman. Dan untuk tingkat pertumbuhan baik pendapatan maupun belanja Kota Padang jauh lebih baik dari Kota Pariaman.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Daerah dan APBD.

Abstract

This study aims to compare the financial performance between the municipal government of Padang city and Pariaman city by analyzing the financial performance of local government of Padang city and Pariaman city in fiscal year 2013-2017 using several ratios. The data obtained in the form of secondary data derived from the financial management of urban asset and agency assets the manager of the financial assets of Padang city and Pariaman city. These data are analyzed by using the calculation of financial ratios, among others, the ratio of the effectiveness of local revenue, the ratio of spending efficiency, the ratio of independence and growth ratio. The result show that the city of Pariaman is more effective in generating local revenues than budgeted rather than the Pariaman city but the padang city is more efficient in spending revenues than the Pariaman city, then the role of the central governments both the padang city and Pariaman city though the padang city more independent than the Pariaman city and for the growth rate of both income and urban shopping much better than the desert town.

Keywords : *Regional Financial Performance, Regional Financial Ratio, Regional Income And Expenditure Budget*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Mardiasmo, 2014:11). Pelimpahan wewenang ini menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri, dimana pemerintah daerah dituntut dapat menggali potensi daerahnya sendiri sebagai sumber penerimaan daerah dan juga dapat mengelola keuangan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya.

Pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seperti menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.

Adapun masalah kinerja di Kota Padang karena banyaknya program kegiatan yang tidak berjalan dan ketidakstabilan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD) dari tahun ke tahun dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Bicara masalah kinerja pemerintahan daerah ada beberapa hal yang mendasar yang mempengaruhinya. Diantaranya berkaitan dengan PAD dan menyangkut penyerapan anggaran. Adapun kinerja di kota Pariaman Dapat dilihat dari peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota Pariaman beberapa tahun terakhir sudah memperlihatkan kecenderungan positif seperti Meningkatnya pendapatan pemerintahan.

Sehingga saya ingin membandingkan Kinerja pemerintahan kota Padang dan Kota pariaman. Karena diantara Kedua pemerintahan tersebut terdapat perbedaan terhadap kinerjanya. Penelitian ini sangat penting dilakukan bagi aparatur pemerintahan dapat memotivasi kinerja daerahnya dan juga dapat melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD).

Atas alasan tersebut di atas, penulis ingin mengetahui sekaligus membandingkan kinerja keuangan kota Padang dan kota Pariaman dalam menjalankan otonomi daerah dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Pemerintah Kota Padang dan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.”**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 ?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara Pemerintah Kota Padang dan Kota Pariaman tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Daerah adalah suatu wilayah teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Definisi lain dari daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Contohnya adalah daerah-daerah otonom seperti yang dimaksud oleh Undang-

undang No. 22 tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintah di Daerah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Secara umum otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan professional (Mardiasmo, 2014:11). Sebagai titik awal pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintahan pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat untuk menjamin proses desentralisasi.

Desentralisasi merupakan memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Desentralisasi juga mempunyai dua otonomi dan medebewind untuk memahami ajaran luas dan isi otonomi daerah perlu ditelusuri dari ajaran yang menjadi pangkal lahirnya konsep desentralisasi (Agus santoso, 2013:28).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Mahsun, 2012:25).

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, alat yang digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan yaitu laporan keuangan. Bahkan kinerja akan selalu menjadi isu aktual dalam organisasi karena apapun organisasinya kinerja merupakan pertanyaan kunci terhadap efektivitas atau keberhasilan organisasi (Sudarmanto, 2012:6).

Indikator Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

3. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan redistribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Dori, 2014:9).

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintahan daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

laporan keuangan daerah secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah untuk alat akuntabilitas publik, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik, sosial, dan politik (Mahmudi, 2016:4). Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik bagi keputusan ekonomik, sosial maupun politik

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam penyusunan rancangan APBD, Kepala Daerah menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD, kemudian Perda APBD tersebut dibahas pemerintah bersama DPRD. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang sudah diperiksa BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang meliputi Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan catatan atas laporan keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Ahmad yani, 2012:44). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain (Ahmad yani, 2012:44)

Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Ahmad yani,2012:59). Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio

keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (putri, 2017:25).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat kita lihat dari kemampuan daerah dalam menggali potensi daerahnya sendiri (otonomi daerah) berupa pengelolaan sumber penerimaan dan belanja yang nantinya bisa kita lihat dari laporan APBD. Penulis ingin membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Pariaman dengan menggunakan indikator berupa rasio keuangan daerah seperti Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efsiensi Belanja, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah mana yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

A. Kota Padang

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari propinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Lokasi penelitian dan pengambilan data di Kantor Badan Keuangan Daerah.

B. Kota Pariaman

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatera dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut. Lokasi penelitian dan pengambilan data di kantor Badan Keuangan Daerah Daerah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah *Library Research*, dimana penulis membaca dan mempelajari buku-buku serta sumber bacaan lainnya yang memuat teori-teori yang berhubungan, sebagai sumber informasi bagi masalah yang sedang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti Laporan Realisasi Anggaran Tahun serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kepentingan peneliti.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2013- 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada. Data yang dibutuhkan berupa laporan keuangan yang dapat diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pariaman.

Metode Analisis Data

1. Untuk perumusan masalah pertama dan kedua, metode analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu menggunakan Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan. Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang dan Kota adalah Tahun 2013-2017.
2. Untuk perumusan masalah ketiga yaitu dengan cara membandingkan angka atau nilai yang dihasilkan dari masing-masing rasio keuangan daerah untuk melihat peningkatan atau penurunan serta perbandingan dari tahun ke tahun kota mana yang lebih baik kinerja keuangannya. Rasio keuangan daerah yang digunakan yaitu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskriptif Data

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :

a. Pajak Daerah

dapat diketahui total penerimaan pajak daerah untuk Kota Padang dan Kota Pariaman selama tahun 2013- 2017. Untuk Kota Padang total penerimaan pajak sebesar Rp 1.128.942.877.841, dimana penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 279.244.514.895 dan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 165.460.994.275. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 29.159.522.291. Kemudian tahun 2015 juga terjadi peningkatan sebesar Rp 38.249.723.752. Selanjutnya tahun 2016 kembali terjadi peningkatan sebesar Rp 23.876.371.469 dan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar Rp 22.497.903.108.

Sementara itu untuk Kota Pariaman total pendapatan dari sektor pajak dari tahun 2013-2017 sebesar Rp 29.605.600.524, dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 8.304.791.195 dan pendapatan pajak terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 3.852.668.277. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 986.975.125. Kemudian tahun 2015 juga terjadi peningkatan sebesar Rp 1.122.333.871. Selanjutnya tahun 2016 kembali terjadi peningkatan sebesar Rp 684.543.104 dan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar Rp 1.658.270.818.

b. Retribusi Daerah

besarnya penerimaan retribusi daerah Kota Padang Dan Kota Pariaman selama tahun 2013- 2017 . Untuk Kota Padang, total pendapatan retribusi yaitu sebesar Rp 219.139.508.607 dimana pendapatan retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 55.736.712.374 dan pendapatan retribusi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 35.517.013.975. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan retribusi yaitu sebesar Rp 9.083.980.129 Kemudian tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 16.326.751.711. Selanjutnya tahun 2015 Rp 5.224.134.656 dan tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp 14.995.563.743. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar Rp 2.446.229.902.

Sementara itu untuk Kota Pariaman, total pendapatan retribusi daerah yaitu sebesar Rp 15.006.223.414,87, dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 3.371.154.780 dan pendapatan retribusi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 2.430.794.204. Pada tahun 2014 terjadi penurunan pendapatan retribusi sebesar Rp 706.836.862. Kemudian pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp 266.078.997,87. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp 674.281.578,13 dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 1.384.617.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

penerimaan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk Kota Padang dan Kota Pariaman tahun 2013- 2017. Untuk Kota Padang, total pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu sebesar Rp 63.942.021.241, dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu Rp 15.883.950.763 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 8.415.720.596. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 2.416.286.424. Kemudian pada tahun 2015 juga terjadi peningkatan sebesar Rp 4.520.560.171. Selanjutnya tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 1.894.791.520 dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.426.175.092.

Sementara itu untuk Kota Pariaman, total pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu sebesar Rp 24.723.648.972, dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 Rp 6.290.774.658 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2014 Rp 4.277.041.035. Pada tahun 2014 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp 246.745.771 . Kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp 508.228.495. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 61.507.413 dan tahun 2017 meningkat sebesar Rp 1.443.997.715.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

menggambarkan penerimaan PAD yang berasal dari Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk Kota Padang dan Kota Pariaman. Untuk Kota Padang, total pendapatan dari Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 335.284.342.950, dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar .Rp 97.326.951.742 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp

25.585.221.042 . Pada tahun 2014 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 28.904.340.928. Kemudian pada tahun 2015 juga terjadi peningkatan sebesar Rp 17.188.785.013 . Selanjutnya tahun 2016 sebesar Rp 14.525.914.230, kemudian tahun 2017 sebesar Rp 11.122.690.529.

Sementara itu untuk Kota Pariaman, total pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp 68.441.676.974,350 dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 16.453.169.131,63 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2013 Rp 9.125.318.165,56. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 6.005.029.357,42 . Kemudian tahun 2015 juga terjadi peningkatan sebesar Rp 1.322.821.609,35 . Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 1.636.837.074,28 dan kemudian tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 1.899.821.961,49.

2. Belanja Daerah

menunjukkan terjadinya peningkatan belanja daerah setiap tahun baik untuk Kota Padang maupun Kota Pariaman. Untuk Kota Padang, total belanja daerah sebesar Rp 8.936.120.254.575, dimana belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar .Rp 2.173.503.996.314 dan belanja terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.400.212.397.096. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp 219.365.290.847. Kemudian pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 174.746.707.960. Selanjutnya tahun 2015 kembali mengalami peningkatan belanja daerah sebesar Rp 154.177.381.416 dan tahun 2016 meningkat sebesar Rp 225.002.218.995.

Sementara itu untuk Kota Pariaman, total belanja daerah yaitu sebesar Rp 2.188.885.358.335, dimana belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 548.357.928.458 dan belanja terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 349.829.174.812. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp 43.354.553.735. Kemudian tahun 2014 juga terjadi peningkatan yaitu sebesar Rp 13.433.313.413. Selanjutnya tahun 2015 kembali terjadi peningkatan belanja sebesar Rp 84.280.442.598 dan pada tahun 2016 belanja daerah meningkat sebesar Rp 57.460.443.900.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kinerja keuangan daerah Kota Padang tahun 2013- 2017 dilihat dari Rasio Efektifitas PAD adalah cukup efektif dimana rata-rata dari kelima tahun tersebut yang mencapai 93,1%. Dan dilihat dari segi Efisiensi Belanjanya menunjukkan bahwa jumlah realisasi belanja Pemerintah Kota Padang lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2013-2017, maka kinerjanya dapat dikatakan cukup efisien. Kemudian dilihat dari Kemandirian Keuangan Daerahnya menggambarkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah dan dari segi pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja sama- sama mengalami pertumbuhan yang positif.
2. Kinerja keuangan daerah Kota Pariaman tahun 2013- 2017 dilihat dari Rasio Efektifitas PAD adalah sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Dan dilihat dari segi Efisiensi Belanjanya menunjukkan bahwa jumlah realisasi belanja Pemerintah Kota Pariaman lebih kecil dari jumlah

yang dianggarkan untuk tahun 2013-2017, maka kinerjanya dapat dikatakan cukup efisien. Kemudian dilihat dari Kemandirian Keuangan Daerahnya menggambarkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah dan dari segi pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja sama- sama mengalami pertumbuhan yang positif.

3. Perbandingan kinerja keuangan Kota Padang dan Kota Pariaman dilihat dari efektifitas penerimaan PAD, Kota Pariaman lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Padang Pada periode 2013-2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pariaman lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan penerimaan PAD yang dianggarkan dibanding dengan Kota Padang. Kemudian dilihat dari efisiensi belanja, Kota Padang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Pariaman yaitu untuk kota Padang sebesar 87,6% dan untuk kota Pariaman sebesar 84,2%. Selanjutnya untuk kemandirian keuangan daerah, Kota Padang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pariaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Padang lebih mampu memanfaatkan sumber PAD dan tidak hanya bergantung pada dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahannya dibandingkan dengan kota Pariaman. Dilihat dari aspek Pertumbuhan Pendapatan, Kota Pariaman lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Padang pada periode 2013-2017 walaupun kedua daerah sama-sama mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Dan untuk tingkat pertumbuhan Belanja, Kota Pariaman lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Padang pada periode 2013-2017

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang dan Kota Pariaman saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Pemerintah Kota Padang seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Kota Padang, melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan.
2. Pemerintah Kota Pariaman diharapkan bisa mempertahankan dan menggali lebih lagi guna mencari beberapa potensi dari masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah Kota Pariaman.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian dan menggunakan indikator penilaian kinerja yang lebih kompleks

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Moeheriono. 2012. Pengukuran Kerja Berbasis Kompetensi. Edisi Revisi. Jakarta: PT.Raja Grafindo
- Mardiasmo, 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta
- Sudarmanto, 2012. Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM. Yogyakarta
- Yani, Ahmad. 2012. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Indonesia. Jakarta
- Batian, Indra. 2005. Akuntansi sector publik. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Edisi Keempat. Jakarta: PT.Raja Grafindo
- Libby, Robert dkk. 2007. Akuntansi Keuangan. Yogyakarta: ANDI
- Santoso, agus. 2013. Menyingkap tabir otonomi daerah di Indonesia. Pustakapelajar. Yogyakarta